

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Fathimiyah *et al.*, 2012 melakukan pengujian empiris tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap *risk management disclosure* survey pada industri perbankan dengan menggunakan sampel sebanyak 24 perusahaan. Dalam penelitian tersebut digunakan struktur kepemilikan berupa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing dan kepemilikan publik. Sedangkan *risk management disclosure* diproksi oleh 8 jenis risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan kepemilikan publik berpengaruh terhadap *risk Management disclosure*. Sedangkan secara parsial dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik (variabel independent), *leverage* dan ukuran perusahaan (*size*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

Pada penelitian Anisa (2012) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh analisis faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Didalam penelitiannya menjelaskan analisis antara tingkat *leverage*, jenis industri, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan publik

terhadap pengungkapan risiko (diukur menggunakan jumlah pengungkapan risiko). Berdasarkan panel kerangka yang digunakan, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi cross-sectional dalam pengungkapan risiko dapat dijelaskan oleh heterogenitas perusahaan yang diamati. Dan menyediakan bukti bahwa tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan risiko. Jenis industri ditemukan tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan risiko, hal ini disebabkan tipe perusahaan *high profile industry* memiliki tingkat persaingan yang lebih ketat dibandingkan dengan *low profile industry*, pengungkapan risiko yang lebih luas akan menguntungkan para pesaing dalam melihat sisi kelemahan perusahaan. Tingkat profitabilitas ditemukan tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan risiko, hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan lebih diperlukan oleh pemegang saham sehingga perusahaan akan lebih sedikit memerlukan pengungkapan risiko. Juga ditemukan bahwa struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan, hal ini dikarenakan struktur kepemilikan saham publik dalam penelitian menunjukkan bahwa rata-rata proporsi kepemilikan saham oleh publik dalam penelitian ini kecil, sehingga tidak mampu menjelaskan populasi penelitian dan mengalami pembiasan.

Lajili (2009) meneliti tentang pengungkapan risiko korporasi dan *corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan publik lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi manajemen risiko atas dan di atas pengungkapan risiko wajib, jika mereka lebih besar dalam ukuran dan jika dewan

direktur memiliki anggota lebih mandiri. Struktur kepemilikan kontrol suara minoritas tampaknya berdampak negatif terhadap pengungkapan risiko dan CEO kompensasi insentif menunjukkan hasil yang beragam.

2.2. Agency Theory

Jensen dan Mackling (dalam Haryono, 2005) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *pricipal* (pemilik) menggunakan orang lain agen (manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaannya. Di dalam teori keagenan yang dimaksud sebagai *pricipal* adalah pemegang saham atau pemilik perusahaan, sedangkan yang dimaksud sebagai agen adalah manajemen yang berkewajiban mengelola harta pemilik. *Pricipal* menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan agen sebagai pengelola berkewajiban untuk mengelola perusahaan sebagaimana yang dipercayakan oleh *pricipal* dalam meningkatkan kemakmuran *pricipal* melalui peningkatan nilai perusahaan (Haryono, 2005).

Dalam praktik nyata di dalam perusahaan, agen sering melanggar kontrak yang telah mereka sepakati bersama oleh *pricipal* yaitu bertanggung jawab dalam mensejahterakan perusahaan dan meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, namun kenyataan agen justru lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan untuk diri mereka sendiri. Para manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya ditanggung oleh pihak lain (Haryono, 2005).

Konflik di dalam teori *agency* biasanya disebabkan oleh pengambilan keputusan yang tidak ikut serta dalam menanggung risiko sebagai akibat dari kesalahan pengambilan keputusan. Menurut para pengambilan keputusan risiko tersebut seharusnya ditanggung oleh para pemilik saham. Hal inilah yang menimbulkan ketidaksinkronan antara pihak pengambilan keputusan dengan para pemilik saham (Anisa, 2012).

Konflik anatar pemilik dengan pihak manajemen perusahaan dapat meminimalkan dengan cara manajer harus menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham begitupula dalam pengambilan keputusan oleh manajer harus disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam menjalankan perusahaan manajer juga dapat dimonitor oleh para pemegang saham (Anisa, 2012). Tetapi pada kenyataannya tidak semua tindakan manajer dapat dimonitor oleh pemegang saham karena kompleksnya aktifitas perusahaan serta semakin besarnya ukuran perusahaan.

Menurut Haryono (2005) terdapat tiga macam biaya dalam teori *agency* yaitu :

1. Biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi aktifitas dan perilaku manajer antara lain membayar auditor untuk mengaudit laporan keuangan dan premi asuransi untuk melindungi *asset* perusahaan.
2. Biaya *bonding* yang ditanggung manajer untuk memberikan jaminan kepada pemilik bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.

3. *Residual loss* adalah biaya yang ditanggung oleh *principal* untuk mempengaruhi keputusan manajer supaya meningkatkan kesejahteraan *principal*.

2.3. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Menurut Cadbury Committee (1997) mendefinisikan *corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dalam mengendalikan perusahaan yang dipandang sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di dalam perusahaan. *Corporate governance* merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003).

Manajer merupakan agen dan pemilik merupakan prinsipal. Pemilik perusahaan ingin memperoleh jaminan untuk mendapatkan *return* atas investasinya, meskipun mereka tidak secara langsung terlibat di dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kegiatan internal perusahaan. Di lain pihak, manajer yang tidak menyukai risiko (*risk averse*) akan bertindak secara oportunistik dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, agar perusahaan dikelola dengan efisien, maka tindakan atau perilaku manajer harus dapat dimonitor (Jensen and Meckling (1976) yang dikutip Hapsoro, 2007)

Menurut Hapsoro (2007) mekanisme *corporate governance* secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, mekanisme internal spesifik perusahaan (*firm-specific internal mechanisms*), yang terdiri atas struktur

kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Kedua, mekanisme tata kelola eksternal spesifik (*country-specific external mechanisms*), yang terdiri atas hak pemegang saham luar, aturan hukum, dan pasar pengendali perusahaan.

Keberadaan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan perilaku manajemen agar di dalam pengelolaan kegiatan korporasi dapat dilakukan secara terbuka, sehingga pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengkaji berbagai keputusan dan dasar pengambilan keputusan yang diambil manajemen serta menilai keefektifan keputusan yang diambil oleh manajemen (Hapsoro, 2007).

Perusahaan seharusnya membuat pernyataan mengenai pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pedoman *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). Pernyataan tersebut disertai dengan uraian tentang aspek-aspek penting yang sekaligus dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas yang berkaitan. Dalam hal ini tidak semua aspek pedoman *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG dapat dilaksanakan, karena perusahaan harus mengungkapkan aspek-aspek yang belum dilaksanakan beserta alasannya. Penjelasan mengenai aspek tersebut dimasukkan dalam uraian tentang informasi penting. Informasi penting yang perlu diungkapkan dalam laporan tahunan meliputi (Fathimiyah *et al.*, 2012) :

- 1 Struktur dan pola kerja Dewan Komisaris
- 2 Struktur dan pola kerja Direksi
- 3 Informasi penting lainnya antara lain :

- a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
- b. Kondisi keuangan perusahaan
- c. Pemegang saham pengendali
- d. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- e. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa
- f. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dan berpengaruh pada operasi perusahaan di masa mendatang.

2.4. Stakeholder

Teori stakeholder menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu tidak beroperasi untuk tujuannya saja, melainkan perusahaan juga harus dapat memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Adapun stakeholder yang dimaksudkan yaitu para pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, supplier, konsumen dan lainnya yang ikut mengambil bagian dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. *Stakeholder* merupakan pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan. (Anisa, 2012).

Teori ini menyatakan para stakeholder memiliki hak untuk mengetahui semua informasi, baik informasi mandatory maupun voluntary, informasi keuangan maupun sosial, mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak kepada stakeholder. Menurut Clarkson (1994) yang dikutip Anisa (201) terdapat dua golongan *stakeholder* yaitu *stakeholder* sukarela dan *stakeholder* non-sukarela. *Stakeholder* sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan investasi di dalam suatu

perusahaan, sedangkan *stakeholder* non-sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang mengalami risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain *stakeholder* adalah pihak yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan.

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* perusahaan harus memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* perusahaan adalah dengan melaksanakan pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para *stakeholder* untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya*. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko yang lebih mendalam dan luas maka memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* (Anisa, 2012).

2.5. Laporan Keuangan

2.5.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut merupakan unsur dari laporan keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Purwandari, 2012).

2.5.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa mendatang. Sedangkan informasi tentang perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan (Purwandari, 2012).

2.5.3. Kelengkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu media pertanggung jawaban perusahaan kepada investor yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya ke usaha-usaha yang paling produktif. Sesuai

dengan salah satu sasaran Undang-Undang Pasar Modal No. 8/1995 yaitu dalam meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal, disebutkan bahwa setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat (Prwandari, 2012).

Menurut Imhoff (Purwandari, 2012) kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Namun makna kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda, banyak peneliti yang menggunakan *index of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan tahunan. Dengan kata lain Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat berkaitan dengan kelengkapan dan luas pengungkapan laporan keuangan. Dalam membuat indeks kelengkapan dan luas pengungkapan dibutuhkan instrumen yang dapat mencerminkan informasi-informasi yang diinginkan secara detail pada masing-masing item laporan keuangan yang telah ditentukan.

2.5.4. Kebijakan Pengungkapan Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan bermaksud untuk meningkatkan mutu dari laporan keuangan. Pengungkapan tersebut bertujuan agar laporan keuangan dapat dimengerti oleh para pemakainya.

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas dengan menerapkan PSAK secara benar dan disertai pengungkapan yang diharuskan PSAK dalam catatan atas laporan keuangan (pengungkapan wajib / *enforced / mandatory disclosure*) (Purwandari, 2012). Informasi lain juga diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.

2.6. Struktur Kepemilikan

Menurut Tamba (2011) Struktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham, atau dengan kata lain struktur kepemilikan adalah perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.

Struktur kepemilikan akan menentukan sifat permasalahan keagenan, yaitu apakah konflik yang dominan terjadi antara manajer dengan pemegang saham atau antara pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dengan pemegang saham minoritas (*minority shareholders*). Dalam konteks perusahaan yang sahamnya dimiliki secara luas, pemilik individual tidak akan bersedia untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan yang dimilikinya karena adanya masalah *free riders* (pengendara gratis). Dalam kondisi tersebut, konsentrasi kepemilikan akan mengurangi biaya politik (*political costs*) dan masalah pengendara gratis (*free rider problem*). Oleh karena itu, pemegang saham yang

kepemilikannya cukup besar dibanding pemegang saham lainnya akan bersedia untuk melakukan pengendalian. Disamping itu konsentrasi kepemilikan akan mempengaruhi *corporate governance*, karena pemegang saham yang memiliki dalam jumlah yang besar akan bersedia untuk melakukan pengendalian (Hapsoro, 2007).

2.6.1. Kepemilikan Manajemen

Menurut Nur'Aeni (2010) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan perusahaan. Kepemilikan saham manajer dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer sebagai seorang pemilik.

Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usaha perusahaan. Dimana, manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga berperan sebagai pemegang saham. Manajemen juga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan (Damsey dan Laber, 1993). Semakin besar kepemilikan manajerial perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah manajemen juga akan menanggung konsikuenstinya dan risikopun akan semakin tinggi (Nur'Aeni, 2010).

2.6.2. Kepemilikan Institusi Domestik

Kepemilikan institusi domestik yaitu kepemilikan saham oleh instansi non-pemerintah atau biasanya berbentuk perseroan terbatas, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun dan institusi lainnya. Kepemilikan saham perusahaan oleh institusi akan mendorong pengawasan yang lebih efektif, karena institusi merupakan kemampuan dalam mengevaluasi risiko manajemen perusahaan (Nur'Aeni, 2010).

Dengan adanya kepemilikan institusi domestik dapat mendorong peningkatan pengelolaan dan pengendalian yang lebih optimal risiko perusahaan, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang digunakan baik itu mendukung maupun memperburuk risiko manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi maka akan semakin besar dorongan institusi untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai keuangan perusahaan sehingga *risk management disclosure* akan meningkat. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi akan mengurangi *agency cost* pada perusahaan serta penggunaan hutang oleh manajemen (Nur'Aein, 2010).

2.6.3. Kepemilikan Institusi Asing

Menurut undang-undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan perusahaan asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Investor institusi asing cenderung lebih konservatif di dalam

melakukan investasi pemilihan saham yang dibelinya dibandingkan dengan investor institusi domestik (Fathimiyah *et al.*, 2012).

Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif dan memberikan efek positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi hanya melintasi batas ambang tertentu. Partisipasi asing terhadap risiko perbankan, khususnya melalui jalur kepemilikan asing ke dalam pasar domestik. Partisipasi asing pada perbankan akibat globalisasi finansial dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer asing dalam perbankan domestik, meningkatnya permintaan dari konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat aliran modal asing yang masuk. Sehingga, jika semakin tinggi kepemilikan asing maka tingkat risikonya pun semakin besar. Dengan demikian, kepemilikan saham asing dalam perusahaan baik dalam pengungkapan risiko (Sudarmono, 2011).

2.6.4. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum atau pihak luar. Semakin besar tingkat kepemilikan saham pihak publik maka akan semakin banyak pengungkapan informasi mengenai *risk management disclosure* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham (Anisa, 2012).

Struktur kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu, kepemilikan saham internal dan kepemilikan saham eksternal. Pihak pemilik saham internal yang dimaksud adalah kepemilikan saham yang dimiliki manajerial perusahaan,

sedangkan pihak pemilik saham eksternal yang dimaksud adalah investor institusional, masyarakat luas dan sebagainya (Anisa, 2012).

2.7. Risk Mangement Disclosure

Risk management disclosure dapat diartikan sebagai pengungkapan atas risiko-risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan dimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan di masa yang akan datang. *Risk management disclosure* sangat berpotensi bagi para analisis, *stakeholder* dan investor. Pengungkapan ini juga merupakan implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap manajemen di dalam suatu korporasi (Amran *et al.*, 2009). Tindakan pengungkapan terhadap manajemen risiko yang diambil perusahaan untuk merespon bermacam-macam risiko. Tindakan ini digunakan untuk mengurangi, menghindari atau mantransfer risiko pada awal proyek konstruksi (Anisa, 2012).

Tujuan positif dari *Disclosure* adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan, sehingga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan dengan cara yang terbaik. Ini berarti bahwa informasi yang tidak material atau relevan harus diabaikan apabila kita mengaharapkan bahwa informasi yang disajikan itu mempunyai makna dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, industri perusahaan perlu mengelola manajemen risiko dengan baik, apalagi jika termasuk klasifikasi perusahaan besar dan mempunyai beberapa anak perusahaan yang tersebar di berbagai titik. Dengan ini, perlunya suatu proses identifikasi, analisis, penilaian dan monitoring suatu

risiko yang sangat cepat perubahannya pada perusahaan dan kemudian perlu segera dilakukan pengukuran atas mitigasi risiko untuk kepentingan *stakeholder's* dan dalam menyeimbangkan *risk and reward*.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko diperlukan dalam perusahaan:

- 1) Merupakan salah satu aspek dalam *good corporate governance*
- 2) Membantu *Top Management* dalam proses pengambilan keputusan bisnis
- 3) Tersedianya ukuran penilaian secara kualitatif dan kuantitatif
- 4) Mendorong perusahaan beroperasi secara lebih efisien (*more developed risk measurement*)
- 5) Mengantisipasi penerapan internal model (*standard s.d advanced*)
- 6) Sebagai sarana *early warning system* bagi *risk management unit* dan *risk management committee*
- 7) Meningkatkan *shareholder's value* (*ultimate objective*)

Sumber : <http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/toswari/2009/06/11/mengapa-risk-management-diperlukan/>

Manajemen risiko memang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengelola suatu risiko yang dimiliki. Menurut Amran *et al* (2009) manajemen risiko digunakan perusahaan untuk mengelola risikonya atau menangkap kesempatan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, karena merupakan hal yang ditakuti oleh perusahaan sehingga dibutuhkan proses pencegahan risiko dengan cara pengungkapan risiko.

Manajemen risiko yang dipilih setiap perusahaan umumnya berbeda satu sama yang lain, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut dalam industri yang sejenis di mana memungkinkan menghadapi risiko yang serupa. Hal ini dikarenakan, manajemen yang berbeda memiliki strategi pengolahan, toleransi terhadap risiko, dan tujuan yang berbeda pula, sehingga penting bagi investor untuk lebih memperhatikan kunci risiko bisnis dan bagaimana setiap risiko dikelola oleh perusahaan (Taures, 2011).

Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999 yang dikutip Taures, 2011). Manfaat pengungkapan risiko adalah :

- 1) Untuk memperbaiki image perusahaan dan memberi informasi kepada *stakeholder* mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko
- 2) Dapat membantu menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga ekuitas bagi investor
- 3) Untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan.

Pengungkapan risiko sangat menguntungkan para investor dan pengguna laporan perusahaan, dengan adanya pengungkapan risiko para investor dan pengguna laporan keuangan dapat mengetahui risiko apa yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya

pengungkapan risiko ini dapat membantu para investor dan pengguna laporan keuangan perusahaan untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

2.8. Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajemen Terhadap *Risk Management Disclosure*

Fathimiyah *et al.* (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap *risk management disclosure*. Sedangkan menurut Purwandari (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang diwakili oleh direksi, manajemen komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan.

Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usahanya dalam perusahaan. Dimana manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan saja melainkan juga berperan sebagai pemegang saham. Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dengan melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi prosentase kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan maka menyebabkan semakin besar pula tanggung jawab manajemen dalam mengambil suatu keputusan sehingga *risk management* pun menjadi semakin tinggi (Dampsey dan Laber, 1993).

H1 : Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

2.8.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusi Domestik Terhadap *Risk Management Disclosure*

Fathimiyah (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusi domestik tidak berpengaruh positif yang signifikan terhadap *risk management disclosure*. Sedangkan menurut Crutchley (1999) yang dikutip fathimiyah (2012) menyatakan bahwa semakin besar prosentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi akan menyebabkan usaha *monitoring* semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku *oportunistik* yang dilakukan manajemen. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi, maka akan mengurangi *agency cost* pada perusahaan serta penggunaan hutang oleh manajemen dan adanya kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk*.

H2 : Kepemilikan institusi domestik berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

2.8.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusi Asing Terhadap *Risk Management Disclosure*

Penelitian yang dilakukan oleh Fathimiyah (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusi asing tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *risk management disclosure*.

Menurut Mawarta (2001) yang dikutip Fathimiyah (2012) menemukan bahwa perusahaan yang berbasis asing tentunya lebih memiliki *skill* karyawan yang memadai, teknologi yang canggih serta jaringan informasi yang sangat luas,

sehingga dapat dipastikan untuk melakukan *risk management disclosure* yang sangat luas. Faktor-faktor tersebutlah yang akan meningkatkan nilai perusahaan apabila di dalam kepemilikan saham perusahaan banyak terdapat kepemilikan institusi asing.

H3 : Kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

2.8.4. Pengaruh Struktur Kepemilikan Publik Terhadap *Risk Management Disclosure*

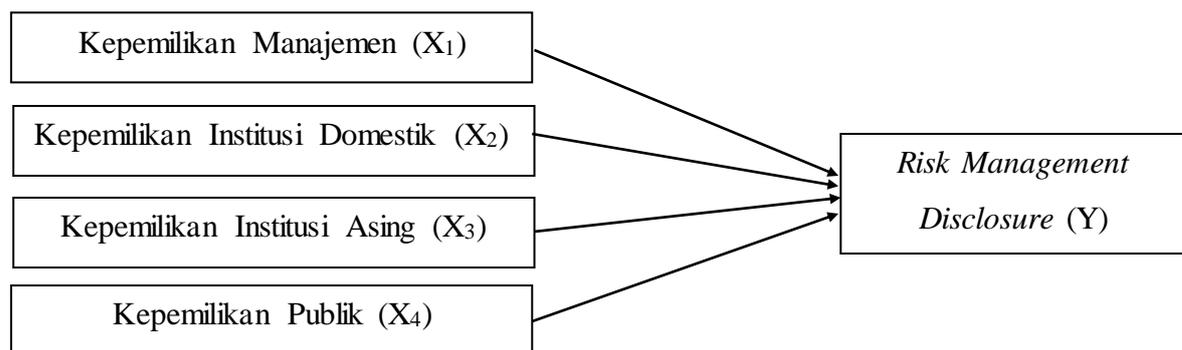
Penelitian yang dilakukan oleh Fathimiyah (2012) menemukan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap *risk management disclosure*. Sedangkan menurut Anisa (2012) menemukan bahwa struktur kepemilikan publik memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan oleh pihak luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan yang semua berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri (Hilmi dan Ali (2008) yang dikutip Anisa, 2012). Sehingga permintaan para *stakeholder* terhadap pengungkapan yang lebih luas, menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi khususnya informasi mengenai risiko secara transparan dan lengkap. Menurut teori *stakeholder*, dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan para *stakeholder*.

H4 : Kepemilikan publik berpengaruh terhadap *risk management disclosure*.

2.9. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka peneliti mengindikasikan faktor *corporate governance* dalam hal ini dilihat dari kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, kepemilikan asing dan kepemilikan publik sebagai variabel independen, dan *risk management disclosure* sebagai dependen. Adapun model kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Krangka Konsep